



BAB **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM** **PEMBANGUNAN DAERAH**

6

Dalam upaya merealisasikan visi, tujuan dan sasaran sesuai dengan misi yang dicanangkan dalam pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan serta program-program pendukungnya, secara terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis, dukungan kelembagaan dan ketersediaan sumber pembiayaan. Berkenaan dengan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Malinau periode RPJMD tahun 2021 – 2026 diuraikan sebagai berikut.

6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan serangkaian tahapan yang berisikan rancangan utama/induk perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Beberapa langkah telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malinau Periode Tahun 2021 – 2026, antara lain: (1) pengkajian terhadap sasaran pembangunan periode sebelumnya; (2) pengkajian gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan; (3) pengkajian permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) pengkajian lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi daerah; (5) mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki; dan (6) memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah.

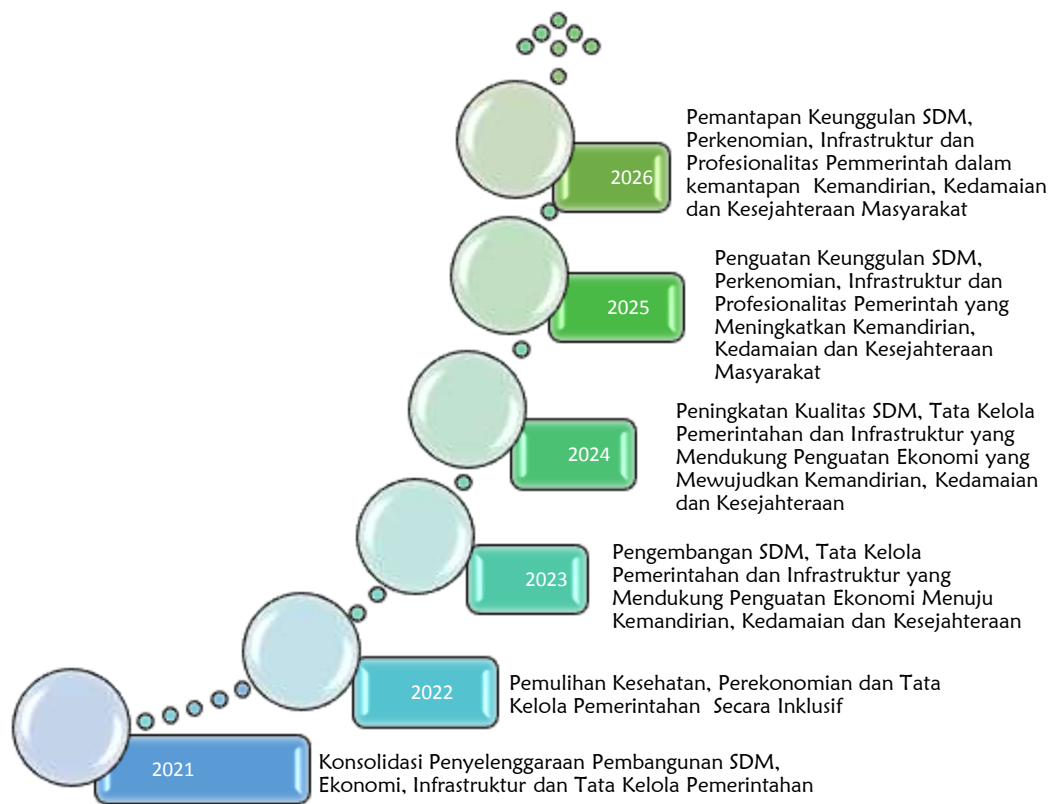
Di sisi lain, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan dalam perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama periode kepala daerah terpilih guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Malinau Periode Tahun 2021–2026 yang rancang untuk dapat



mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan memperhatikan urusan wajib pemerintah daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, agenda dan prioritas pembangunan nasional, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan kapasitas perangkat daerah Kabupaten Malinau adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 6.1.

Arah kebijakan tahunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan panduan yang mengarahkan perumusan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran setiap tahapan dalam kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2026. Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk merasionalkan pilihan strategi sehingga rencana pembangunan memiliki tema/fokus. Penekanan tema/fokus setiap tahun selama periode RPJMD harus memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1
Tema/Fokus Pembangunan Kabupaten Malinau
Tahun 2021 – 2026
Berdasarkan Tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau sebagaimana sebagaimana disajikan pada Gambar 6.1, maka



tahapan pembangunan secara berturut-turut dalam kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah Tahap Konsolidasi (tahap 1 tahun 2021), Tahap Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 (tahap II tahun 2022), Tahap Pengembangan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan (tahap III tahun 2023), Tahap Peningkatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan (tahap IV tahun 2024), Tahap Penguatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan (tahap V tahun 2025) dan Tahap Pemantapan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan (tahap VI tahun 2026). Secara rinci berkenaan dengan tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Tahap Konsolidasi

Tahun 2021 merupakan tahapan I atau “Tahapan Konsolidasi”, dimana tahun 2021 merupakan masa transisi pemerintahan Kabupaten Malinau dari kepala Daerah Periode 2016 – 2021 kepada Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) periode tahun 2021 – 2024. Oleh karenanya, pada awal kepemimpinan kepala daerah Kabupaten Malinau melakukan konsolidasi atas penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Malinau yang meliputi: (1) penyelenggaraan pembangunan SDM; (2) penyelenggaraan pembangunan ekonomi; (3) penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur fisik maupun non fisik; (4) penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik; (5) lain-lain sesuai urusan daerah. Sehingga tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2021 adalah “Konsolidasi Penyelenggaraan Pembangunan SDM, Ekonomi, Infrastruktur dan Tata Kelola Pemerintahan”. Sesuai kondisi, konsolidasi atas penyelenggaraan pembangunan tersebut tidak terlepas dari upaya penanganan pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia tak terkecuali Kabupaten Malinau sejak tahun 2020 yang lalu. Dimana penyelenggaraan pembangunan bidang SDM, ekonomi, infrastruktur dan tata Kelola pemerintahan diarahkan pada upaya mendukung penanganan pandemi Covid-19.

2) Tahap Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19



Tahun 2022 merupakan tahapan II atau “Tahapan Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19” dalam RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026, dimana tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2022 adalah “Pemulihan Kesehatan, Perekonomian dan Tata Kelola Pemerintahan Secara Inklusif”. Hal ini sejalan dengan upaya penanganan pandemi covid-19 pada tahun 2020 - 2021. Makna dari tema/fokus pembangunan tersebut dideskripsikan sebagai berikut: Proses pemulihan berbagai aspek kehidupan pasca pandemi Covid-19 perlu dilakukan mengingat dampak pandemi Covid-19 setara dengan bencana besar atau perang, sehingga dibutuhkan program pemulihan kesehatan dan ekonomi dengan pemerintah sebagai pemain utamanya, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Malinau. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Malinau harus memastikan upaya pembangunan yang menjamin pemulihan kesehatan dan ekonomi, yang dilakukan melalui prioritas pembangunan sebagai berikut: (1) Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat; (2) Peningkatan ketahanan pangan; (3) Peningkatan produktifitas sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal; (4) Peningkatan nilai tambah sektor industri, perdagangan dan jasa; (5) Pembangunan infrastruktur pemerataan ekonomi; (6) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah; dan (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malinau harus tetap memperhatikan penyelenggaraan pembangunan bidang lainnya, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial, peningkatan dukungan sistem informasi pelayanan publik, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan lain-lain yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah Kabupaten Malinau.

3) Tahap Pengembangan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahtera

Tahun 2023 merupakan tahapan III atau “Tahapan Pengembangan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan” dalam RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2021-2026, dimana tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah



“Pengembangan SDM, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Mendukung Penguatan Ekonomi Menuju Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan”. Dalam hal ini, pengembangan berarti pemerintah selalu berusaha secara bertahap dan teratur melaksanakan pembangunan yang mengarah pada tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Secara rinci makna dari tema pembangunan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

a. Pengembangan SDM

Manusia merupakan modal utama pembangunan Kabupaten Malinau untuk menuju pembangunan yang mengikutsertakan semuanya dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Kabupaten Malinau berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter melalui: (1) pengembangan kualitas layanan kesehatan masyarakat; (2) pengembangan kualitas layanan pendidikan; (3) pengembangan produktivitas tenaga kerja; (4) pengembangan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan; (5) pengembangan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat; (6) pengembangan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan; dan (7) pengembangan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya.

b. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah Kabupaten Malinau harus terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, termasuk dunia usaha yang memperkuat perekonomian daerah melalui: (1) pengembangan perencanaan, dan evaluasi pembangunan; (2) pengembangan kualitas pelaporan, pembinaan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah; (3) pengembangan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar; (4) pengembangan zona integritas yang bebas korupsi, bersih dan melayani; (5) pengembangan pendapatan pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya; (6)



pengembangan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; (7) pengembangan akses informasi publik yang akurat dan up to date; (8) pengembangan cakupan layanan publik; dan (9) pengembangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

c. Pengembangan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan infrastruktur yang mampu menciptakan/menuatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan/berkesinambungan ini dilakukan melalui: (1) Pengembangan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase; (2) Pengembangan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut; (3) Pengembangan ketersediaan air bersih konsumsi domestik; (4) Pengembangan fasilitas perdagangan pasar tradisional; (5) Pengembangan pelayanan irigasi; (6) Pengembangan drainase lingkungan perumahan/permukiman; (7) Pengembangan sarana prasarana sanitasi perumahan/permukiman; (8) Pengembangan rumah layak huni; (9) Pengembangan jangkauan layanan informasi digital dan sistem informasi pelayanan publik; (10) Pengembangan pengendalian pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan; dan (11) Pengembangan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah.

d. Pengembangan Penguatan Ekonomi

Pengembangan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong perkembangan ekonomi yang mengarah pada penguatan ekonomi yang berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pengembangan ekonomi dapat dipacu untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik dan berdaya saing melalui: (1) Pengembangan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; (2) Pengembangan keberdayaan pelaku industri dan sarana



prasarana industri; (3) Pengembangan perizinan dan kestabilan harga; (4) Pengembangan sarana distribusi perdagangan dan ekspor; (5) Pengembangan perlindungan terhadap konsumen; (6) Pengembangan peran jasa konstruksi dan jasa angkutan; (7) Pengembangan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan; (8) Pengembangan desa wisata budaya; Mengembangkan sumber daya ekonomi kreatif; (9) Pengembangan desa kreatif; (10) Pengembangan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat; (11) Pengembangan kinerja koperasi dan UMKM; dan (12) Pengembangan promosi dan pelayanan perijinan investasi.

4) Tahap Peningkatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan

Tahun 2024 merupakan tahapan IV atau “Tahapan Peningkatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan” dalam RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026, dimana tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2024 adalah “Peningkatan Kualitas SDM, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Mendukung Penguatan Ekonomi yang Mewujudkan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan”. Dalam hal ini, peningkatan dimaksud berarti pemerintah Kabupaten Malinau secara berkesinambungan melakukan upaya untuk semakin menambah/meningkatkan pengembangan dan pembangunan untuk mencapai kemajuan sesuai tujuan dan sasaran yang dikehendaki, meliputi peningkatan dalam aspek kualitas SDM, tata Kelola pemerintahan, infrastruktur dan ekonomi. Secara rinci makna dari tema pembangunan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

a. Peningkatan SDM

Pemerintah Kabupaten Malinau berkomitmen secara berkesinambungan untuk meningkatkan pengembangan dan pembangunan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang semakin sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter melalui: (1) Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat; (2) Peningkatan kualitas layanan pendidikan; (3) Peningkatan produktivitas tenaga kerja; (4) Peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan; (5)



Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat; (6) Peningkatan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan; dan (7) Peningkatan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya.

b. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Malinau semakin hadir dalam melindungi segenap warga masyarakat, memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas dengan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat dari berbagai kalangan tak terkecuali masyarakat dunia usaha yang berperan dalam memperkuat perekonomian daerah melalui: (1) Peningkatan perencanaan, dan evaluasi pembangunan; (2) Peningkatan kualitas pelaporan, pembinaan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah; (3) Peningkatan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar; (4) Peningkatan zona integritas yang bebas korupsi, bersih dan melayani; (5) Peningkatan pendapatan pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya; (6) Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; (7) Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date; (8) Peningkatan cakupan layanan publik; dan (9) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

c. Peningkatan Infrastruktur

Peningkatan pengembangan infrastruktur dimaksudkan untuk semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar. Peningkatan pengembangan infrastruktur yang semakin menciptakan/ menguatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan/berkesinambungan ini dilakukan melalui: (1) Peningkatan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase; (2) Peningkatan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut; (3) Peningkatan ketersediaan air bersih konsumsi domestik; (4) Peningkatan fasilitas perdagangan pasar tradisional; (5) Peningkatan pelayanan irigasi; (6) Peningkatan drainase lingkungan perumahan/permukiman; (7) Peningkatan sarana prasarana sanitasi perumahan/permukiman; (8) Peningkatan



rumah layak huni; (9) Peningkatan jangkauan layanan informasi digital dan sistem informasi pelayanan public; (10) Peningkatan pengendalian pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan; dan (11) Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah.

d. Peningkatan Penguatan Ekonomi

Hasil dari upaya pengembangan inovasi dan kualitas investasi harus terus ditingkatkan untuk semakin mendorong peningkatan ekonomi yang menguatkan perekonomian daerah. Peningkatan perekonomian ini dipacu untuk mencapai pertumbuhan yang semakin lebih baik dan semakin berdaya saing melalui: (1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; (2) Peningkatan keberdayaan pelaku industri dan sarana prasarana industri; (3) Peningkatan perizinan dan kestabilan harga; (4) Peningkatan sarana distribusi perdagangan dan ekspor; (5) Peningkatan perlindungan terhadap konsumen; (6) Peningkatan peran jasa konstruksi dan jasa angkutan; (7) Peningkatan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan; (8) Peningkatan desa wisata budaya; (9) Peningkatan sumber daya ekonomi kreatif; (10) Peningkatan desa kreatif; (11) Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat; (12) Peningkatan kinerja koperasi dan UMKM; dan (13) Peningkatan promosi dan pelayanan perijinan investasi.

5) Tahap Penguatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan

Tahun 2025 merupakan tahapan V atau “Tahapan Penguatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan” dalam RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026, dimana tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2025 adalah “Penguatan Keunggulan SDM, Perekonomian, Infrastruktur dan Profesionalitas Pemerintah yang Meningkatkan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan Masyarakat”. Dalam hal ini, penguatan dimaksud berarti pemerintah Kabupaten Malinau



secara berkesinambungan melakukan upaya untuk semakin berdaya dalam melakukan pengembangan dan pembangunan untuk mencapai kemajuan sesuai tujuan dan sasaran yang dikehendaki, meliputi penguatan/keberdayaan dalam aspek keunggulan SDM, tata Kelola pemerintahan, infrastruktur dan ekonomi. Secara rinci makna dari tema pembangunan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

a. Penguatan Keunggulan SDM

Pemerintah Kabupaten Malinau terus melakukan upaya penguatan dalam pengembangan dan pembangunan keunggulan SDM yaitu sumber daya manusia yang semakin unggul dari sisi kesehatan, kecerdasan, inovasi, keterampilan, dan karakternya melalui: (1) Penguatan layanan kesehatan masyarakat; (2) Penguatan layanan pendidikan; (3) Penguatan produktivitas tenaga kerja; (4) Penguatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan; (5) Penguatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat; (6) Penguatan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan; dan (7) Penguatan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya.

b. Penguatan keunggulan perekonomian

Penguatan perekonomian dipacu untuk mencapai pertumbuhan yang semakin prima/unggul melalui: (1) Penguatan keunggulan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; (2) Penguatan keunggulan keberdayaan pelaku industri dan sarana prasarana industri; (3) Penguatan keunggulan perizinan dan kestabilan harga; (4) Penguatan keunggulan sarana distribusi perdagangan dan ekspor; (5) Penguatan keunggulan perlindungan terhadap konsumen; (6) Penguatan keunggulan peran jasa konstruksi dan jasa angkutan; (7) Penguatan keunggulan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan; (8) Penguatan keunggulan desa wisata budaya; (9) Penguatan keunggulan sumber daya ekonomi kreatif; (10) Penguatan keunggulan desa kreatif; (11) Penguatan keunggulan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat; (12) Penguatan keunggulan kinerja koperasi dan UMKM; dan (13) Penguatan keunggulan promosi dan pelayanan perijinan investasi.



c. Penguatan Keunggulan Infrastruktur

Penguatan keunggulan infrastruktur dimaksudkan untuk semakin memberdayakan pertumbuhan ekonomi dan memberdayakan pemenuhan pelayanan dasar. Penguatan keunggulan infrastruktur yang semakin memberdayakan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar secara berkelanjutan/berkesinambungan ini dilakukan melalui: (1) Penguatan keunggulan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase; (2) Penguatan keunggulan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut; (3) Penguatan keunggulan ketersediaan air bersih konsumsi domestik; (4) Penguatan keunggulan fasilitas perdagangan pasar tradisional; (5) Penguatan keunggulan pelayanan irigasi; (6) Penguatan keunggulan drainase lingkungan perumahan/permukiman; (7) Penguatan keunggulan sarana prasarana sanitasi perumahan/permukiman; (8) Penguatan keunggulan rumah layak huni; (9) Penguatan keunggulan jangkauan layanan informasi digital dan sistem informasi pelayanan publik; (10) Penguatan keunggulan pengendalian pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan; dan (11) Penguatan keunggulan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah.

d. Penguatan Profesionalitas Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki tata kelola pemerintahan semakin kuat dan didukung aparatur yang professional serta dapat memberikan pelayanan publik yang semakin prima/unggul serta berperan dalam memperkuat perekonomian daerah melalui: (1) Penguatan profesionalitas dalam perencanaan, dan evaluasi pembangunan; (2) Penguatan profesionalitas dalam penyusunan dokumen pelaporan, pembinaan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah; (3) Penguatan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar; (4) Penguatan profesionalitas dalam mewujudkan zona integritas yang bebas korupsi, bersih dan melayani; (5) Penguatan profesionalitas dalam pengelolaan pendapatan pajak, retribusi,



dan sumber-sumber lainnya; (6) Penguatan profesionalitas dalam pelaksanaan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; (7) Penguatan profesionalitas dalam penyediaan akses informasi publik yang akurat dan up to date; (8) Penguatan profesionalitas dalam cakupan layanan publik; dan (9) Penguatan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

6) Tahap Pemantapan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan

Tahun 2026 merupakan tahapan VI atau “Tahapan Pemantapan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan” dalam RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026, dimana tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2026 adalah “Pemantapan Keunggulan SDM, Perkenomian, Infrastruktur dan Profesionalitas Pemerintah dalam kemantapan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan Masyarakat”. Dalam hal ini, pemantapan dimaksud berarti pemerintah Kabupaten Malinau secara berkesinambungan melakukan upaya untuk semakin memperkuat pengembangan dan pembangunan untuk mencapai kemajuan sesuai tujuan dan sasaran yang dikehendaki, meliputi kemantapan dalam aspek keunggulan SDM, tata Kelola pemerintahan, infrastruktur dan ekonomi. Secara rinci makna dari tema pembangunan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

a. Pemantapan Keunggulan SDM

Pemerintah Kabupaten Malinau terus melakukan upaya memperkuat/ memperkuat pengembangan dan pembangunan keunggulan SDM yaitu sumber daya manusia yang semakin mantap/kokoh dari sisi kesehatan, kecerdasan, inovasi, keterampilan, dan karakternya melalui: (1) Pemantapan layanan kesehatan masyarakat; (2) Pemantapan layanan pendidikan; (3) Pemantapan produktivitas tenaga kerja; (4) Pemantapan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan; (5) Pemantapan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat; (6) Pemantapan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan; dan (7) Pemantapan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya.



b. Pemantapan Keunggulan Perekonomian

Pemantapan perekonomian dipacu untuk mencapai pertumbuhan yang sangat prima/unggul melalui: (1) Penguatan keunggulan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; (2) Penguatan keunggulan keberdayaan pelaku industri dan sarana prasarana industri; (3) Penguatan keunggulan perizinan dan kestabilan harga; (4) Penguatan keunggulan sarana distribusi perdagangan dan ekspor; (5) Penguatan keunggulan perlindungan terhadap konsumen; (6) Penguatan keunggulan peran jasa konstruksi dan jasa angkutan; (7) Penguatan keunggulan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan; (8) Penguatan keunggulan desa wisata budaya; (9) Penguatan keunggulan sumber daya ekonomi kreatif; (10) Penguatan keunggulan desa kreatif; (11) Penguatan keunggulan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat; (12) Penguatan keunggulan kinerja koperasi dan UMKM; dan (13) Penguatan keunggulan promosi dan pelayanan perijinan investasi.

c. Pemantapan Keunggulan Infrastruktur

Pemantapan pengembangan infrastruktur dimaksudkan untuk semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat pemenuhan pelayanan dasar. Pemantapan keunggulan infrastruktur yang semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan/ berkesinambungan ini dilakukan melalui: (1) Pemantapan keunggulan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase; (2) Pemantapan keunggulan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut; (3) Pemantapan keunggulan ketersediaan air bersih konsumsi domestik; (4) Pemantapan keunggulan fasilitas perdagangan pasar tradisional; (5) Pemantapan keunggulan pelayanan irigasi; (6) Pemantapan keunggulan drainase lingkungan perumahan/permukiman; (7) Pemantapan keunggulan sarana prasarana sanitasi perumahan/permukiman; (8) Pemantapan keunggulan rumah layak huni; (9) Pemantapan keunggulan jangkauan layanan informasi digital dan sistem informasi pelayanan publik; (10) Pemantapan keunggulan pengendalian pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan



gambut, serta pengendalian tutupan lahan; dan (11) Pemantapan keunggulan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah.

d. Pemantapan Profesionalitas Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki tata kelola pemerintahan semakin mantap/kokoh dan didukung aparatur yang professional serta dapat memberikan pelayanan publik yang sangat prima/unggul serta berperan dalam memantapkan/memperkokoh perekonomian daerah serta berperan dalam memantapkan/memperkokoh perekonomian daerah melalui: (1) Pemantapan profesionalitas dalam perencanaan, dan evaluasi pembangunan; (2) Pemantapan profesionalitas dalam penyusunan dokumen pelaporan, pembinaan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah; (3) Pemantapan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar; (4) Pemantapan profesionalitas dalam mewujudkan zona integritas yang bebas korupsi, bersih dan melayani; (5) Pemantapan profesionalitas dalam pengelolaan pendapatan pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya; (6) Pemantapan profesionalitas dalam pelaksanaan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; (7) Pemantapan profesionalitas dalam penyediaan akses informasi publik yang akurat dan up to date; (8) Pemantapan profesionalitas dalam cakupan layanan publik; dan (9) Pemantapan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.



Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Pembangunan Kabupaten Malinau
“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul			
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi	1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Peningkatan kualitas layanan Kesehatan masyarakat	1. Memantapkan UKP, UKM dan ketersediaan farmasi, makanan minuman dan alat kesehatan
			2. Meningkatkan kompetensi SDM dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
	2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1. Memantapkan pengelolaan pendidikan jenjang SD, SMP, PAUD dan kesetaraan/non formal
			2. Mengembangkan kurikulum muatan lokal, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
			3. Mengendalikan



			penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat
	3. Meningkatnya profesionalitas tenaga kerja	1. Peningkatan produktivitas tenaga kerja	1. Memantapkan perencanaan dan penempatan tenaga kerja
			2. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja
	4. Meningkatnya ketahanan pangan	2. Pemantapan hubungan kerja dan pengendalian ketenagakerjaan	1. Memperkuat hubungan industrial bidang ketenagakerjaan
			1. Meningkatkan kedaulatan dan keamanan pangan
			2. Meningkatkan diversifikasi pangan
2. Menciptakan suasana kondusif yang mendukung pengembangan Sumber	1. Terciptanya kehidupan yang aman, tenteram dan harmonis serta bebas bencana	1. Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat	3. Meningkatkan penanggulangan kerawanan pangan
			1. Meningkatkan pemberdayaan perlindungan masyarakat



daya Manusia		2. Penguatan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana	1. Meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana
	2. Meningkatnya kesetaraan gender	1. Peningkatan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan	1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan
			2. Meningkatkan cakupan layanan dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan
	3. Mantapnya kehidupan keagamaan serta karakter dan budaya masyarakat	1. Penguatan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya	1. Memperkuat ideologi Pancasila 2. Memperkuat kerukunan umat beragama, budaya politik dan fasilitasi penanganan konflik
MISI 2: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Daerah, karakteristik dan Kearifan Lokal			
1. Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi dan	1. Meningkatnya produktifitas sektor sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan
			2. Meningkatkan produksi dan



Karakteristik Daerah	2. Meningkatnya nilai tambah sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berorientasi pada potensi dan karakteristik wilayah		produktivitas perikanan
		1. Pengembangan keaneragaman dan kualitas produk industri lokal	1. Memberdayakan pelaku industri dan Mengembangkan sarana prasarana industri
		2. Penguatan industri perdagangan dan jasa daerah	1. Mengendalikan perizinan dan menstabilkan harga
			2. Mengembangkan sarana distribusi perdagangan dan ekspor
			3. Memantapkan perlindungan terhadap konsumen
		3. Peningkatan kunjungan wisata	4. Memperkuat peran jasa konstruksi dan jasa angkutan
			1. Meningkatkan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan
			2. Mengembangkan desa wisata budaya
			3. Mengembangkan sumber daya ekonomi kreatif



			4. Mengembangkan desa kreatif
	3. Mantapnya kemandirian ekonomi masyarakat	1. Penguatan kemandirian masyarakat serta koperasi dan UMKM	1. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat
			2. Mengembangkan dan meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM
	4. Meningkatnya Investasi Daerah	1. Penciptaan iklim usaha penanaman modal yang kondusif	1. Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan investasi
MISI 3: Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan			
1.	1. Terbangun dan berkembangnya infrastruktur pemerataan ekonomi berwawasan lingkungan	1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur perhubungan	1. Meningkatkan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase
			2. Meningkatkan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut
		2. Peningkatan infrastruktur air bersih	1. Meningkatkan ketersediaan air bersih konsumsi domestik
		3. Peningkatan infrastruktur	1. Mengembangkan fasilitas perdagangan pasar



		perdagangan	tradisional
		4. Peningkatan jaringan pengairan/irigasi	1. Meningkatkan pelayanan irigasi
	2. Meningkatnya kualitas perumahan/ permukiman	1. Pembangunan sarana prasarana perumahan/ permukiman	1. Membangun drainase lingkungan perumahan/permukiman
			2. Membangun sarana prasarana sanitasi perumahan/permukiman
			3. Membangun rumah layak huni
	3. Berkembangnya sistem teknologi informasi yang membuka keterisolan daerah	1. Peningkatan kualitas pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika didukung sarana dan prasarana yang memadai	1. Meningkatkan jangkauan layanan informasi digital
	4. Berkembangnya dukungan sistem informasi pelayanan publik	1. Pengembangan dukungan sistem informasi pelayanan publik	1. Mengembangkan sistem informasi pelayanan publik
2. Mewujudkan Kualitas	1. Meningkatnya kualitas lahan,	1. Perlindungan dan	1. Mengendalikan pencemaran



Lingkungan Hidup	air dan udara	pengelolaan lingkungan hidup	udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan
			2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah
MISI 4: Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan			
1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good governance)	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	1. Penguatan perencanaan, dan evaluasi pembangunan	1. Memantapkan perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis kinerja
		2. Peningkatan kualitas pelaporan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah	1. Meningkatkan kualitas pelaporan pembangunan berbasis kinerja
			2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah



	2. Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	1. Penyelenggaran pemerintahan yang bersih	1. Meningkatkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar
		2. Peningkatan zona integritas yang bebas korupsi	1. Meningkatkan WBK dan WBBM
	3. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1. Intensifikasi peningkatan Pendapatan Pajak, Retribusi,dan Sumber - sumber lainnya	1. Meningkatkan Pendapatan Pajak, Retribusi,dan Sumber - sumber lainnya
	4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date	1. Peningkatan cakupan layanan pengukuran IKM 2. Peningkatan akses informasi publik 3. Meningkatkan cakupan layanan publik 4. Menyediakan informasi publik yg akurat dan up to date
	5. Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan berbasis desa	1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Meningkatkan pelayanan umum dan tata kelola pemerintahan desa



6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Dengan mempertimbangkan sinergi rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta mengantisipasi pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan yang diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan di wilayah timur, maka arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026 diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis yang merupakan kawasan yang diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting di lingkup nasional, provinsi dan kabupaten. Kawasan strategis tersebut di Kabupaten Malinau terdiri atas:

- 1) Kawasan Strategis Nasional, yang terdiri atas: (1) kawasan perbatasan darat RI dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur); dan (2) kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*).
- 2) Kawasan Strategis Provinsi, yang ada di Kabupaten Malinau adalah Long Nawang dan kawasan sekitarnya yang akan dikembangkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal perbatasan dan pedalaman.
- 3) Kawasan Strategis Kabupaten, yang terdiri atas: (1) kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan ekonomi (Perkotaan Malinau, Long Nawang, Kecamatan Malinau Utara dan Kecamatan Mentarang); (2) Kawasan Strategis Kabupaten untuk kepentingan sosial budaya (pusat pemerintahan Kabupaten Malinau, kawasan warisan budaya di Kecamatan Bahau Hulu, Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Sungai Boh); (3) Kawasan Strategis Kabupaten untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam (pertambangan batubara di Kecamatan Malinau Selatan); dan (4) Kawasan Strategis Kabupaten untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup (Taman Nasional Kayan Mentarang).

Secara rinci arah kebijakan pembangunan kawasan strategis Kabupaten Malinau adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 6.2.



Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis
Kabupaten Malinau 2021-2026

Kawasan Strategis		Arah Kebijakan	
Kawasan Strategis Nasional	1	Kawasan perbatasan darat RI dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur)	1 Meningkatkan keunggulan SDM
			2 Membangun dan memfasilitasi pengembangan infrastruktur perhubungan, dasar dan teknologi informasi
			3 Meningkatkan kesadaran bela negara
			4 Memfasilitasi kelancaran pelayanan lintas batas negara
			5 Mengembangkan kerjasama lokal perdagangan lintas batas
	2	Kawasan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo)	1 Mengupayakan peningkatan partisipasi pendanaan pelestarian kawasan Heart of Borneo
Kawasan Strategis Provinsi			2 Mengembangkan kawasan Heart of Borneo sebagai destinasi wisata alam dan budaya
	3	Long Nawang dan kawasan sekitarnya	1 Memfasilitasi pengembangan infrastruktur pemerataan ekonomi
Kawasan Strategis Kabupaten			2 Mengembangkan infrastruktur pedesaan kawasan tertinggal dan pedalaman perbatasan
	4	Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan ekonomi: Perkotaan Malinau, Long Nawang, Kecamatan Malinau Utara dan Kecamatan Mentarang	1 Mengembangkan infrastruktur ekonomi, perdagangan dan jasa
			2 Mengembangkan ekonomi dan perdagangan lintas batas
			3 Meningkatkan produktifitas kawasan minapolitan dan agropolitan
	5	Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan sosial budaya: pusat pemerintahan Kabupaten Malinau dan kawasan warisan budaya di Kecamatan Bahau Hulu, Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Sungai Boh	1 Mengembangkan infrastruktur perkotaan
			2 Mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai luhur warisan budaya
	6	Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam: pertambangan batu bara di Kecamatan Malinau Selatan	1 Meningkatkan nilai tambah pemanfaatan sumber daya alam batu bara
			2 Memperkuat pengawasan reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang
	7	Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup: Taman Nasional	1 Memperkuat konservasi sumber daya hayati
			2 Memfasilitasi investasi sarana prasarana wisata lingkungan



Kawasan Strategis		Arah Kebijakan
	Kayan Mentarang	alam

Selain itu, arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Malinau diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah desa dan wilayah kecamatan.

1) Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Desa/Kelurahan

Dengan memperhatikan program-program yang dicanangkan, meliputi Program Desa Sarjana, Program Milenial Mandiri, Program Rasda PLUS, Program RT Bersih dan Program WM Malinau Maju, maka strategi pembangunan wilayah desa di Kabupaten Malinau secara umum adalah “peningkatan kemandirian, kedamaian dan kesejahteraan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi di desa”. Strategi umum tersebut dijabarkan dalam strategi khusus sebagai berikut; (1) pengembangan potensi dan karakteristik keunggulan desa/kelurahan; (2) peningkatan ketahanan pangan; (3) peningkatan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim; (4) peningkatan kewirausahaan desa; dan (5) peningkatan konektivitas desa.

Arah kebijakan pembangunan wilayah desa/kelurahan antara lain adalah: (1) meningkatkan kapasitas aparat desa; (2) mengembangkan SDM sesuai kebutuhan desa; (3) meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui pemberdayaan masyarakat (pendampingan, pembinaan, penyuluhan, pelatihan, kursus, magang); (4) meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi bencana; (5) membangun sarana prasarana dasar dan ekonomi, (6) mengembangkan ekonomi kreatif berbasis potensi dan kearifan lokal pedesaan.

2) Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kecamatan

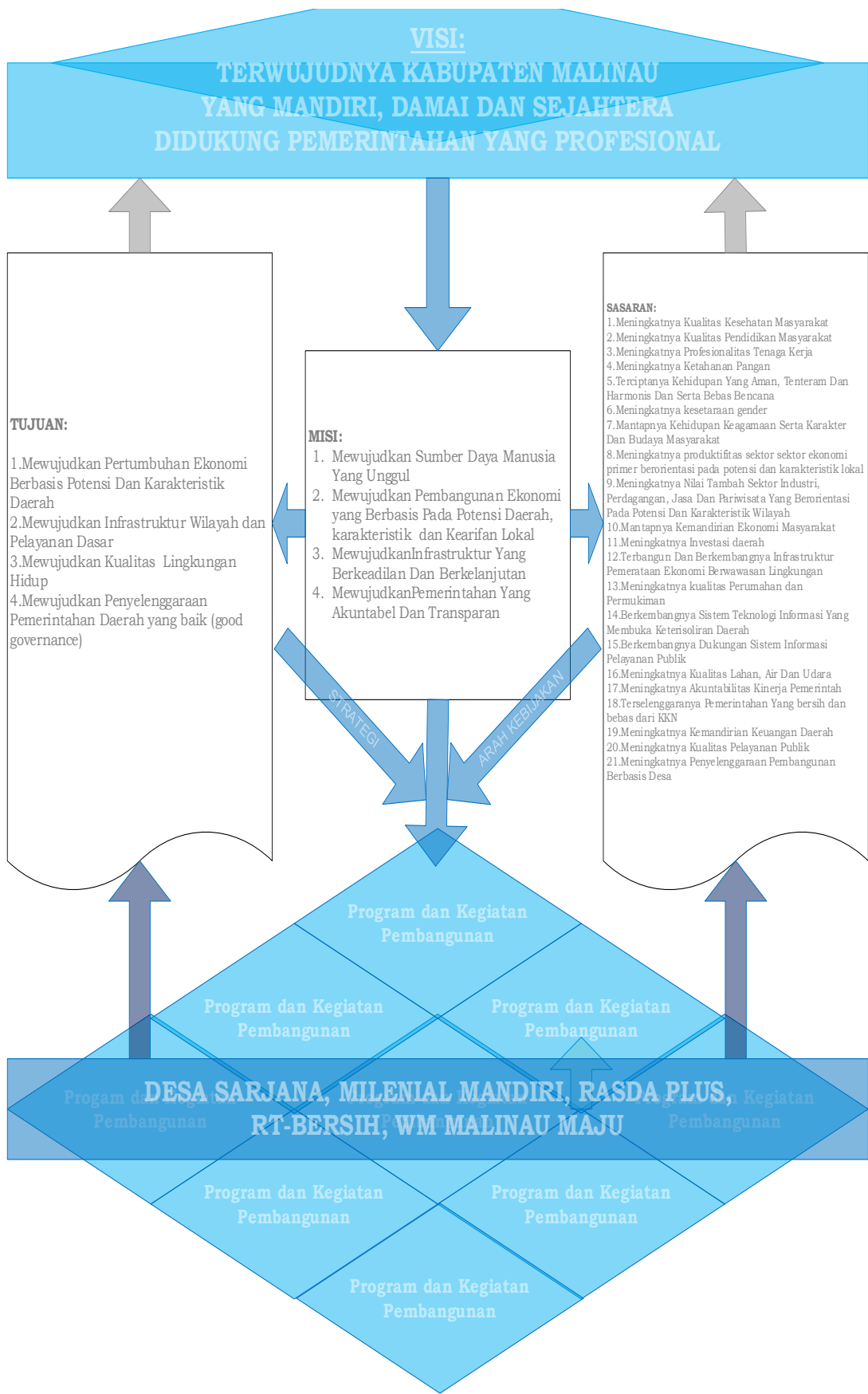
Strategi pembangunan wilayah kecamatan meliputi: (1) pengembangan kawasan strategis pusat pengembangan kegiatan lokal yang unggul dan berdaya saing; (2) peningkatan koordinasi pembangunan wilayah desa/kelurahan; (3)



peningkatan ketahanan pangan; (4) pengembangan inovasi dan keunggulan kecamatan; (5) peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim; serta (6) peningkatan konektivitas antar desa dan antar kecamatan. Oleh karenanya, arah kebijakan pembangunan wilayah kecamatan antara lain: (1) meningkatkan kapasitas aparat kecamatan; (2) membangun dan mengembangkan prasarana kewilayahan; (3) membangun dan mengembangkan prasarana dasar; (4) membangun dan mengembangkan prasarana ekonomi; (5) mengembangkan ekonomi kreatif berbasis keunggulan desa; (6) memperluas kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan.

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

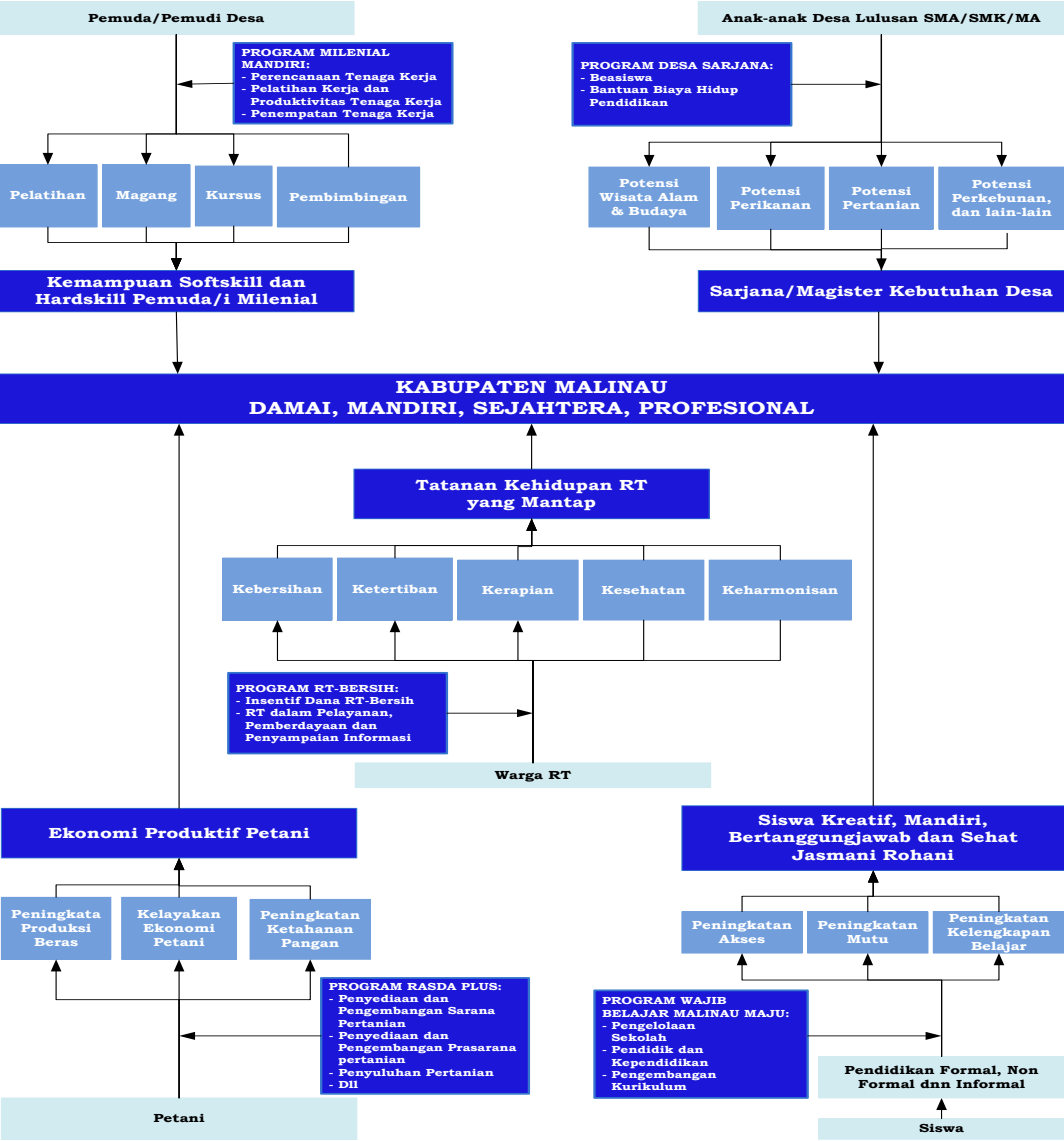
Pencapaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malinau periode tahun 2021 – 2026 sangat ditentukan oleh program-program yang akan dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah, baik program yang langsung berpengaruh terhadap pencapaian indikator kinerja maupun program yang secara tidak langsung berpengaruh. Program-program tersebut terdiri atas berbagai kegiatan dan sub kegiatan turunan yang lazimnya merupakan tahapan terselesaikannya program. Secara rinci program-program pembangunan Kabupaten Malinau sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malinau periode tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 6.3. Sedangkan keterkaitan program-program pembangunan Kabupaten Malinau dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2021 – 2026 diilustrasikan dalam bentuk Gambar 6.2 berikut:



Gambar 6.2
Keterkaitan Program-Program Pembangunan Kabupaten Malinau Dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026



Dalam rangka lebih memfokuskan program-program pembangunan, dilakukan melalui pendekatan program inovasi daerah. Hal ini dimaksudkan agar visi “***Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai Dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional***” dapat direalisasikan sesuai harapan masyarakat Malinau. Program-program inovasi daerah tersebut terdiri atas 5 (lima) program, yaitu: (1) Program Desa Sarjana; (2) Program Milenial Mandiri; (3) Program Rasda Plus; (4) Program RT-Bersih; dan (5) Program Wajib Belajar Malinau Maju. Alur pikir 5 (lima) program inovasi daerah tersebut dalam dengan visi Malinau periode tahun 2021 – 2026 diilustrasikan dalam bentuk Gambar 6.3.



Gambar 6.3
Ilustrasi Alur Pikir Program Inovasi Daerah



Secara rinci 5 program inovasi daerah tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Program Desa Sarjana

Program Desa Sarjana merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia pedesaan melalui penciptaan sarjana yang handal, yakni sarjana yang mampu menjadi pioner pembangunan pedesaan sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki desanya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Kabupaten Malinau memiliki 109 desa yang memiliki potensi dan karakteristik serta permasalahan yang berbeda. Dengan demikian desa mengusulkan kebutuhan sarjana/sarjana terapan/ magister sesuai dengan kebutuhan desanya. Desa yang memiliki ekosistem yang baik dan menarik, desa yang memiliki adat istiadat yang terjaga secara turun temurun, desa yang memiliki potensi pengembangan tanaman pangan, desa yang memiliki potensi tanaman perkebunan, desa penghasil ternak dan ikan, desa yang memiliki potensi hasil hutan non kayu yang melimpah, desa dengan karakteristik lahan yang bergunung dan berlereng terjal, desa yang memiliki lahan cenderung landai, dan desa-desa dengan potensi dan karakteristik lainnya tentu menghendaki kehadiran seorang sarjana/sarjana terapan/magister yang handal sesuai dengan kondisi tersebut bagi pengembangannya. Melalui Program Desa Sarjana pembangunan Kabupaten Malinau akan lebih dipercepat, oleh karenanya Program Desa Sarjana akan difasilitasi, dibiayai dan dikontrol oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dan dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal melalui skema beasiswa.

2) Program Milenial Mandiri

Program Milienial Mandiri merupakan program yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan atributif (*softskill*) dan keterampilan teknis (*hardskill*) bagi kaum muda milenial yang



telah selesai menempuh pendidikan formal, baik pada tingkat pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Program ini ingin menjadikan anak-anak (putra-putri) terbaik Kabupaten Malinau yang tersebar di desa-desa untuk menjadi pengelola potensi wilayah/desa, yang selanjutnya putra-putri terbaik tersebut diharapkan dapat menjadi tenaga kerja profesional dan bahkan wirausahawan milenial. Program ini direalisasikan melalui fasilitasi dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat agar kaum milenial mendapatkan pembinaan dan pelatihan/kursus/magang bersertifikat. Program-program yang berkenaan dengan program milenial mandiri ini meliputi perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja serta penempatan tenaga kerja. Melalui upaya ini diharapkan generasi milenial dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki keterampilan kerja, berkarakter positif, mandiri dan berdaya saing sehingga dapat berperan serta dalam pembangunan. Pelatihan/kursus/ magang yang harus diikuti oleh putra-putri milenial tersebut akan disinkronkan dengan kebutuhan pembangunan daerah, seperti untuk memenuhi kebutuhan pembangunan PLTA, industri pengolahan, industri kerajinan tangan, seni rupa, industri batik daerah, industri kuliner, seni pertunjukan, industri periklanan, industri wisata dan lain-lain. Program Milenial Mandiri juga merupakan perwujudan “revolusi mental” yang dicanangkan Pemerintah Indonesia, yaitu mengubah mental generasi milenial agar memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu berkompetisi dan berinovasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

3) Program Rasda PLUS

Program Rasda PLUS dilatarbelakangi oleh keberadaan penduduk Malinau yang tersebar pada desa-desa yang menempati wilayah yang luas dan potensial bagi usaha tani, yang bertujuan untuk: (1) meningkatkan produksi beras sehingga masyarakat/petani dapat memenuhi kebutuhan berasnya secara mandiri (sendiri); (2) menghidupkan ekonomi masyarakat melalui tanaman pangan (padi)



dan mendidik masyarakat agar tidak bergantung pada beras yang bersumber dari pemerintah; (3) meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Malinau dengan ketersediaan pangan yang cukup. Sasaran utama yang ingin dicapai dalam Program Rasda PLUS adalah kemampuan memberikan nilai ekonomi produktif bagi para petani di Kabupaten Malinau. Program Rasda PLUS ini dilaksanakan melalui: (1) penyediaan dan pengembangan sarana pertanian; (2) penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian; dan (3) penyuluhan pertanian, dan lain-lain. Dimana secara teknis kegiatannya meliputi: (1) perluasan lahan pertanian tanaman pangan melalui optimalisasi lahan pangan potensial (lahan tidur); (2) peningkatan bantuan sarana prasarana (bibit unggul padi, alat pertanian, pupuk, jalan usaha tani, irigasi, dll); (3) pemberian insentif jaminan penghasilan; (4) pengembangan pengetahuan dan keterampilan melalui pembinaan, penyuluhan dan pelatihan-pelatihan; (5) legalisasi dan perlindungan lahan pangan. Melalui Program Rasda PLUS ini Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk membeli beras yang dihasilkan petani Malinau yang selanjutnya didistribusikan kepada keluarga sasaran. Pelaksananya secara operasional dilakukan oleh BUMD Intimung Kabupaten Malinau. Oleh karenanya, program ini diharapkan dapat mendorong petani untuk mengolah lahan yang mereka miliki untuk dioptimalkan pemanfaatannya bagi tanaman pangan, sehingga produktivitas lahan dan produksi gabah/beras yang dihasilkan dapat semakin meningkat dan mencukupi konsumsi rumah tangga dan dapat diperjualbelikan, sehingga memiliki nilai ekonomi.

4) Program RT-Bersih

Program RT-Bersih merupakan program pembangunan Rukun Tetangga (RT) dengan menerapkan nilai-nilai filosofi Kerapian (Rapi), Ketertiban (Tertib), Kebersihan (Bersih), Kesehatan (Sehat), Keindahan (Indah) dan Keharmonisan (Harmonis) yang disingkat menjadi **RT-BERSIH**. Program ini bertujuan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam merencanakan dan membangun, sehingga peran warga RT (masyarakat) dalam pembangunan Kabupaten Malinau semakin meningkat. Sasaran utama program ini adalah mantapnya tatanan kehidupan bermasyarakat ditinjau berdasarkan kerapian, ketertiban, kebersihan, Kesehatan, keindahan dan keharmonisannya. Agar



program RT-Bersih ini dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan, maka insentif yang diberikan kepada RT senilai Rp 260 jt, pemberiannya akan dilakukan dalam 2 tahap. Dalam pengelolaan dana ini pihak RT (Ketua dan Pengurus RT) yang merupakan *supporting line* atau *second opinion* dan sebagai lembaga yang paling dekat dengan warga serta paling mengetahui persoalan warga, sekaligus sebagai ujung tombak pelayanan, pemberdayaan dan penyampaian informasi kepada warga diberi hak penuh untuk mengelola (merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi) dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing RT. Harapannya dana tersebut dapat digunakan untuk merealisasikan suatu kondisi RT yang Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah dan Harmonis yang selanjutnya dapat mengembangkan potensi yang dimiliki RT sebagai sumber pendapatan masyarakat. Selain itu, program RT-Bersih ini dilaksanakan dengan adanya fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak-pihak lain yang kompeten.

5) Program Wajib Belajar Malinau Maju

Program Wajib Belajar Malinau Maju merupakan program pengembangan dari program wajib belajar. Program ini merupakan implementasi dari peran pemerintah daerah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa agar memiliki pengetahuan untuk berkembang menjadi kreatif, mandiri, bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani. Pemerintah Daerah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan yang menjamin pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan serta penyiapan kelengkapan peralatan belajar siswa, terutama anak-anak generasi penerus bangsa yang berada di jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Program ini juga akan menekankan pada pemberian insentif pendidikan seperti insentif buku, baju, sepatu yang diberikan pemerintah kabupaten kepada peserta didik. Namun demikian ditargetkan program ini memberikan efek pengganda (*multiplier effect*), sehingga pembiayaan pendidikan dapat sekaligus memajukan Kabupaten Malinau. Insentif pendidikan tersebut harus mampu menumbuhkan usaha/industri disekitar



dunia pendidikan tersebut, seperti usaha/industri kecil sepatu, usaha/industri kecil pakaian/baju, maupun terbitnya buku-buku muatan lokal yang memiliki HaKI, sebagai kekayaan intelektual Kabupaten Malinau.

Program-program inovatif tersebut operasionalisasinya melalui berbagai program-program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dinyatakan dalam Kepmendagri Nomor: 050-3708 Tahun 2020, dimana berbagai program tersebut direncanakan untuk dapat menjalankan kewenangan pemerintah kabupaten dalam urusan wajib dan urusan pilihan yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Malinau juga harus tetap memperhatikan urusan pemerintahan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, misalnya urusan yang berkenaan dengan bidang Pendidikan tingkat SLTA, ketenagalistrikan, pertambangan, kehutanan, Daerah Otonom Baru (DOB) dan lain-lain, namun karena urusan tersebut juga menyangkut hajat hidup masyarakat Malinau, maka Pemerintah Kabupaten Malinau tetap berkomitmen memberi perhatian terhadap urusan-urusan tersebut melalui upaya koordinasi, fasilitasi maupun mediasi.

Dalam hal masyarakat di wilayah-wilayah 3T di Kabupaten Malinau belum dapat terlayani listrik, maka pemerintah daerah akan berupaya mengkoordinasikan dan memfasilitasi agar daerah-daerah tersebut dapat teraliri listrik, misalnya fasilitasi pengembangan PLTS, PLMH, PLTD oleh PLN atau memberikan dukungan terhadap pembangunan PLTA Mentarang yang dicanangkan pembangunannya oleh Pemerintah Provinsi melalui investasi pihak swasta. Dalam hal, terjadi konflik usaha pertambangan dengan masyarakat lokal, pihak Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat lokal Kabupaten Malinau harus hadir sebagai fasilitator ataupun mediator dalam penanganan konflik tersebut. Demikian seterusnya untuk urusan-urusan lainnya yang bukan kewenangan kabupaten.



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2016

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2022			2023		2024		2025		2026						
	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mandiri	MISI 1: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL															
1.1	Tujuan 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,52	72,85		73,18		73,51		73,84		74,17		74,17		
1.1.1	Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	71,84	71,94		72,05		72,16		72,27		72,38		72,38		
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Fasilitas Kesehatan Dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alkes Dan Ketersediaan Obat Essensial Yang Sesuai Standar	89,5%	89,5%	53.434.598.4 00	89,5%	56.995.830.0 00	94,7%	60.465.830.00 0	95%	59.011.830.00 0	100%	60.174.830.00 0	100%	290.082.918.4 00	DINKES PPKB
		Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		
		Cakupan Faskes Yg Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,5%	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase Ketersediaan Sdmk Sesuai	81%	81%	16.530.200.0 00	81%	25.289.060.0 00	81%	25.120.060.00 0	81%	25.120.060.00 0	81%	26.220.060.00 0	81%	118.279.440.0 00	DINKES PPKB



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2022			2023		2024		2025		2026						
	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Manusia Kesehatan	Standar Di Faskes														
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Kecamatan Dengan Pemberian Izin Operasi, Pembinaan Dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	100%	-	-	-	-	-	198.000.000	100%	548.000.000	100%	198.000.000	100%	944.000.000	DINKES PPKB
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Kecamatan Dengan Kegiatan Advokasi, Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Serta Pelaksanaan UKBM	100%	100%	480.000.000	100%	2.255.860.00 0	100%	2.255.860.000	100%	2.255.860.000	100%	2.255.860.000	100%	9.503.440.000	DINKES PPKB
1.1.2	Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Angka)	9,07	9,37		9,67		9,97		10,27		10,57		10,57		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi Sekolah	100%	100%	91.906.099.6 01	100%	99.839.656.6 01	100%	104.926.137.6 01	100%	106.754.859.6 01	100%	109.297.967.6 01	100%	512.724.721.0 05	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditempatkan sesuai analisis kebutuhan per wilayah	100%	100%	29.200.000.0 00	100%	28.313.552.8 04	100%	28.010.581.75 0	100%	28.330.645.75 0	100%	28.317.301.75 0	100%	142.172.082.0 54	DINAS PENDIDIKAN



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.1.3	Sasaran 3. Meningkatnya Profesionalitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,14	4,24-5,14		4,35-5,25		4,44-5,34		4,55-5,45		4,64-5,54		4,64-5,54		
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	100%	100%	100.000.000		-			100%	150.000.000		-	100%	250.000.000	DINAS KETENAGAKERJ AAN
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pelatihan Dan Peningkatan Produktivas Tenaga Kerja	100%	100%	1.130.000.00 0	100%	1.480.000.00 0	100%	1.565.000.000	100%	1.865.000.000	100%	2.085.000.000	100%	8.125.000.000	DINAS KETENAGAKERJ AAN
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Dan Ditempatkan	100%	100%	584.952.000	100%	599.055.000	100%	800.000.000	100%	581.000.000	100%	455.000.000	100%	3.020.007.000	DINAS KETENAGAKERJ AAN
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Peresentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, Lks Bipartit, Strutur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta Bpjs Ketenagakerjaan)	-	100%	950.000.000	100%	850.000.000	100%	975.000.000	100%	830.000.000	100%	675.000.000	100%	4.280.000.000	DINAS KETENAGAKERJ AAN
1.1.4	Sasaran 4. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (Ikp)	72,21	73,65		75,09		76,52		77,96		79,4		79,4		
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya	Persentase Infrastruktur Pendukung	0	1 Dokumen Perencanaan	50.000.000	1 Unit	207.922.632	0	-	0	-	0	-	1 Unit	257.922.632	DINAS KETAHANAN



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Kemandirian Pangan Dalam Kondisi Baik		Gudang												PANGAN
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	4%	4%	895.000.000	6%	662.028.623	6%	843.731.749	8%	766.323.219	8%	687.707.116	8%	3.854.790.708	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	6%	7%	125.000.000	7%	126.950.000	7%	128.930.420	7%	130.941.735	8%	132.984.426	8%	644.806.580	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu Dan Keamanan Pangan	57,50%	57,50%	50.000.000	57,50%	50.780.000	57,50%	51.572.168	57,50%	52.376.694	57,50%	53.193.770	57,50%	257.922.632	DINAS KETAHANAN PANGAN
1.2	Tujuan 2. Menciptakan Suasana Kondusif Yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Ketahanan Nasional	2,7	2,75		2,78		2,8		2,82		2,85		2,85		
1.2.1.1	Sasaran 1. Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram Dan Harmonis Dan Serta Bebas Bencana	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Dan Ketentraman	100	100		100		100		100		100		100		



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti		100%	739.872.550	100%	715.000.000	100%	764.000.000	100%	615.000.000	100%	805.000.000	100%	3.638.872.550	SATPOL PP
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	29.610.000	100%	29.610.000	100%	29.610.000	100%	29.610.000	100%	29.610.000	100%	148.050.000	KECAMATAN MALINAU KOTA
		Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	29.994.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	109.994.000	KECAMATAN MALINAU UTARA DAN PERWAKILAN MALTARA TIMUR
		Proporsi Orang Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian	100%	100%	29.994.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	29.994.000	KECAMATAN MENTARANG
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	45 Kali	45 Kali	38.000.000	45 Kali	44.000.000	45 Kali	44.000.000	45 Kali	44.000.000	45 Kali	44.000.000	45 Kali	214.000.000	KECAMATAN MENTARANG HULU
		Proporsi Orang Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian	100%	100%	29.994.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	29.994.000	KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR
		Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	15.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	215.000.000	KECAMATAN BAHAU HULU
1.2.1.2		Indeks Resiko Bencana	124,4	124,4		124,4		124,4		124,4		124,4		124,4		
1.05.03	Program Penanggulangan	Persentase Pelayanan Dalam		100%	1.124.000.00	100%	1.141.534.40	100%	1.159.342.336	100%	1.177.428.077	100%	1.195.795.955	100%	5.798.100.768	BPBD



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Bencana	Rangka Pencegahan, Mitigasi Dan Penyelamatan Serta Evakuasi Korban Bencana			0		0									
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana		100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	450.000.000	DPPPAS
1.05.04	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kecamatan yang mendapat pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran		100%	150.000.000	100%	55.097.600	100%	125.000.000	100%	921.311.600	100%	125.000.000	100%	1.376.409.200	SATPOL PP
1.2.2	Sasaran 2. Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	82,36	83,36		84,36		85,36		86,36		87,36		87,36		
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pengarusutamaan Gender	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	DPPPAS
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Perempuan	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	750.000.000	DPPPAS
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100%	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	1.150.000.000	DPPPAS
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data	Persentase Sistem Data Gender Dan	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	DPPPAS



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2022			2023		2024		2025		2026						
	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Gender Dan Anak	Anak														
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	100%	100%	290.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	810.000.000	DPPPAS
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Perlindungan Khusus Anak	100%	100%	180.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.380.000.000	DPPPAS
1.2.3.1	Sasaran 3. Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter Dan Budaya Masyarakat	1. Indeks Kerukunan Beragama (Poin)		79,25		80,6		81,7		82,8		83,3		83,3		
1.2.3.2		2. Indeks Pembangunan Kebudayaan/ Masyarakat (Poin)	77,5	78,5		79,5		80,5		81,5		82,5		82,5		
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman Karakter Kebangsaan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	225.000.000	KESBANGPOL
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta	Persentase Pendidikan Politik Untuk Parpol Yang Ada Di Kabupaten Malinau		100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	675.000.000	KESBANGPOL



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Budaya Politik															
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama		100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	550.000.000	KESBANGPOL
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kualitas Keadaan Aman, Nyaman Dan Damai Di Lingkungan Masyarakat		100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	550.000.000	KESBANGPOL
Mandiri- Sejahtera	MISI 2: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERBASIS PADA POTENSI DAERAH, KARAKTERISTIK DAN KEARIFAN LOKAL															
2.1	Tujuan 1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Dan Karakteristik Daerah	1. Pertumbuhan PDRB (%)	2,0-4,0	3,0-5,0		5,28		5,54		5,86		6,17		6,17		
		2. Indeks Gini (Poin)	0,287	0,285		0,283		0,282		0,28		0,278		0,278		
		3. Angka Kemiskinan	6,63	7,30	6,5-6,75		6-6,5		5,5-6,5		5,5-6		5,5-6			
		4. Laju Inflasi	0,39	0,36		0,33		0,3		0,27		0,24		0,24		
2.1.1.1	Sasaran 1. Meningkatnya Produktifitas Sektor Sektor	1. Kontribusi Pertanian Dalam Arti Luas (Tnp, Holti, Ternak,	4,8	4,82		4,9		4,92		4,95		5		5		



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2022			2023		2024		2025		2026						
	Program Pembangunan Daerah			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Ekonomi Primer Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Lokal	Perikanan) Terhadap Pdrb (%)														
2.1.1.2		2. Nilai Tukar Petani (Poin)	103,59	103,65		103,7		103,8		103,85		103,9		103,9		
2.1.1.3		3. Nilai Tukar Peternak (Poin)	103,15	103,2		103,25		103,3		103,35		103,4		104,4		
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	100%	100%	1.233.708.800	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	4.633.708.800	DISPERTAN
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	100%	1.107.220.000	100%	5.025.000.000	100%	4.875.000.000	100%	4.925.000.000	100%	4.975.000.000	100%	20.907.220.000	DISPERTAN
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	100%	490.000.000	100%	750.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	3.790.000.000	DISPERTAN
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100%	-	-	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	1.000.000.000	DISPERTAN
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	100%	100%	49.396.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	449.396.000	DISPERTAN



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2022			2023		2024		2025		2026						
	Program Pembangunan Daerah				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
3.27.07	Program Penyuluh Lapangan	Persentase Penyuluh Lapangan	100%	100%	2.097.075.200	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	2.997.075.200	DISPERTAN
2.1.1.4		4. Nilai Tukar Nelayan (Poin)	102,8	102,91		102,95		102,99		1103,02		103,05		103,05		
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	68 Ton	70 Ton	475.000.000	72 Ton	525.000.000	74 Ton	525.000.000	76 Ton	525.000.000	78 Ton	555.000.000	370 Ton	2.605.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	175 Ton	184 Ton	913.940.000	193 Ton	1.195.000.000	202 Ton	1.195.000.000	212 Ton	1.195.000.000	222 Ton	1.265.000.000	1013 Ton	5.763.940.000	DINAS PERIKANAN
3.25.06	Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Sarana Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan		8 Unit	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 Unit	100.000.000	DINAS PERIKANAN
2.1.2.1	Sasaran 2. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	1. Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB (%)	2,60%	2,70%		2,70%		2,80%		3,00%		3,00%		0,03		
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha sektor industri	100%	100%	3.180.864.003	100%	2.247.716.783	100%	2.272.668.003	100%	2.683.668.003	100%	1.165.168.003	100%	11.550.084.795	DISPERINDAG



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2022			2023		2024		2025		2026						
	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Prosentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	80%	80%	340.000.000	80%	345.000.000	80%	345.000.000	80%	345.000.000	80%	360.000.000	100%	1.735.000.000	DISPERINDAG
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Peningkatan jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	0%	0%	335.000.000	100%	899.951.220	100%	511.902.500	100%	505.000.000	100%	2.148.500.000	100%	4.400.353.720	DISPERINDAG
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Prosentase peningkatan jumlah konsumen yang dilindungi	100%	100%	90.000.000	100%	75.000.000	100%	77.500.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	407.500.000	DISPERINDAG
2.1.2.2		2. Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	1.82%	1.84%		1.84%		1.85%		1.85%		1.86%		1.86%		
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	100%	548.000.000	100%	630.000.000	100%	380.000.000	100%	1.080.000.000	100%	530.000.000	100%	3.168.000.000	DISBUDPAR
2.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata	100%	100%	430.000.000	100%	540.000.000	100%	385.000.000	100%	240.000.000	100%	285.000.000	100%	1.880.000.000	DISBUDPAR
2.1.3.1	Sasaran 3. Mantapnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	1. Persentase Koperasi Berkualitas	66%	70%		72%		74%		75%		80%		80%		
2.1.3.2		2. Pesentase Peningkatan Usaha	55,40%	70,60%		73,30%		76,60%		83,30%		100%		100%		



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2022			2023		2024		2025		2026						
	Program Pembangunan Daerah				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
		Mikro Dan Kecil (%)														
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Peningkatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlinsungan Hak Kekayaan Intelektual	100%		-	100%	220.000.000		-		-		-	100%	220.000.000	DISBUDPAR
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	100%	100%	65.000.000	100%	210.000.000	100%	175.000.000	100%	240.000.000	100%	365.000.000	100%	1.055.000.000	DISBUDPAR
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial	100%	100%	850.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.850.000.000	DPPPAS
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan	100%	100%	680.300.000	100%	680.250.000	100%	680.250.000	100%	680.250.000	100%	680.250.000	100%	3.401.300.000	DPMD
2.17.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Prosentase peningkatan jumlah Diklat Koperasi yang diadakan	100%	100%	390.304.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	790.304.000	DISPERINDAG
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil	Prosentase UMKM yang Diberdayakan	5%	5,0%	1.209.808.000	2,50%	891.000.000	4,70%	1.294.097.500	3,70%	895.000.000	3,10%	750.000.000	19%	5.039.905.500	DISPERINDAG



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Dan Usaha Mikro (UMKM)															
2.1.4.	Sasaran 4. Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah (Rp Milyar)	90.050.000. 000	80.500.000.0 00		91.100.000.0 00		92.000.000.0 00		93.000.000.0 00		94.000.000.0 00		940000000 00		DPMPTSP
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha	100%	100%	429.232.000	100%	435.928.019	100%	442.728.496	100%	449.635.061	100%	456.649.368	100%	2.214.172.944	DPMPTSP
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Peminat Investasi	100%	100%	293.756.000	100%	298.338.594	100%	302.992.677	100%	307.719.361	100%	312.519.783	100%	1.515.326.415	DPMPTSP
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Atas Pelayanan Perizinan	78,60%	78,66%	334.200.000	78,70%	339.413.520	78,75%	344.708.371	78,8%	350.085.822	78,85%	355.547.160	78,90%	1.723.954.873	DPMPTSP
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA Dan PMDN	-0,02%	0,01%	572.627.000	0,01%	194.227.406	0,01%	197.257.354	0,01%	200.334.569	0,01%	203.459.788	0.03%	1.367.906.117	DPMPTSP
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Informasi Yang Tersampaikan Kepada Masyarakat	100%	100%	85.000.000	100%	86.326.000	100%	87.672.686	100%	89.040.379,50	100%	90.429.409	100%	438.468.474,5 2	DPMPTSP
Sejahtera	MISI 3: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN															
3.1	Tujuan 1. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Dan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Ikli)(Poin)	3,5-4,5	3,7		3,8		3,9		4		4,1		4,1		



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelayanan Dasar															
3.1.1.1	Sasaran 1. Terbangun Dan Berkembangnya Infrastruktur Pemerataan Ekonomi Berwawasan Lingkungan	1. Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	45,10%	50,0%		52,1%		54,8%		59,6%		64,4%		64,4%		
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	100,00%	0,53%	44.509.081.100	0,54%	44.000.000.000	0,56%	45.317.823.024	0,58%	45.546.957.011	0,60%	45.733.699.534	0,60%	225.107.560.669	DPUPR PERKIM
3.1.1.2		2. Persentase Daerah/Wilayah Banjir (%)	1,24%	2%		2%		2%		2%		2%		2%		
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Pengurangan Luas Genangan Banjir Di Kawasan- Kawasan Pusat Layanan		-	-	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.000.000.000	DPUPR PERKIM
3.1.1.3		3. Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi (%)	60%	65%		70%		75%		80%		85%		85%		
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang beroperasi	100%	100%	1.070.000.000	100%	3.740.000.000	100%	3.740.000.000	100%	3.740.000.000	100%	3.740.000.000	100%	16.030.000.000	DISHUB
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan pelayaran	100%	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	290.000.000	DISHUB



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2022			2023		2024		2025		2026						
	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.1.1.4		4. Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	62%	67%		72%		77%		82%		87%		87%		
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	100%	56,40%	9.697.625.40 0	65,80%	1.100.000.00 0	66%	800.000.000	66,20%	800.000.000	66,40%	800.000.000	66,80%	13.197.625.40 0	DPUPR PERKIM
3.1.1.5		5. Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi (%)	27,3	28,01		30,34		32,46		34,69		36,92		36,92		
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di Ws Kewenangan Kab/Kota	100%	10,45%	4.925.000.00 0	10,67%	7.000.000.00 0	10,97%	7.210.000.000	11,28%	7.282.100.000	11,59%	7.311.956.610	11,59%	33.729.056.61 0	DPUPR PERKIM
3.1.2.1	Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Permukiman	1. Pesentase Pemukiman Yang Layak	76	77		79		80		81		81,97		81,97		
3.1.2.2		2. Rasio Rumah Layak Huni (Nilai Angka Rasio)	4:05	7:09		7:09		7:09		7:09		7:09		7:09		
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Di Tangani	100%	0,58%		0,88%	1.100.000.00 0	1,18%	1.050.000.000	1,48%	850.000.000	1,78%	950.000.000	1,78%	3.950.000.000	DPUPR PERKIM



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2022			2023		2024		2025		2026						
	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Atau Warga Korban Bencana Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	0%	55,30%		55,80%	350.000.000	56,10%	350.000.000	56,50%	350.000.000	56,70%	350.000.000	56,70%	1.400.000.000	
3.1.3	Sasaran 3. Berkembangnya Sistem Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Wilayah Yang Terlayani Tik	100	100		100		100		100		100		100		
2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Penyebaran Informasi Publik	100%	100%	1.172.223.40 0	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	2.572.223.400	DISKOMINFO
3.1.4	Sasaran 4. Berkembangnya Dukungan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi (%)	78,18	78,18		78,18		78,18		78,18		78,18		78,18		
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Penggunaan Aplikasi Informatika	100%	100%	4.783.312.60 0	100%	3.596.772.00 0	100%	3.496.772.000	100%	3.477.536.000	100%	3.367.536.000	100%	18.721.928.60 0	DISKOMINFO
3.2	Tujuan 4. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Ikli)	78,95	79,03		79,11		79,19		79,27		79,35		79,35		



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.2.1.1	Sasaran 1. Meningkannya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	100	100		100		100		100		100		100		
3.2.1.2		2. Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	53,55	53,65		53,75		53,85		53,95		54,05		54,05		
3.2.1.3		3. Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	91,15	91,25		91,36		91,47		91,58		91,68		91,68		
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,77 Poin	79,15 Poin	350.000.000	79,52 Poin	1.190.000.000	79,52 Poin	1.190.000.000	79,52 Poin	1.190.000.000	79,52 Poin	1.190.000.000	79,446 Poin	5.110.000.000	DLH
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kabupaten/Kota	85%	86%	9.170.000.000	87%	9.600.000.000	87%	9.600.000.000	87%	9.600.000.000	87%	9.600.000.000	87%	47.570.000.000	DLH
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	21,20%	5.083.349.200	21,30%	2.100.000.000	21,50%	1.600.000.000	21,80%	1.100.000.000	22%	700.000.000	22,15%	10.583.349.200	DPUPR PERKIM
Mandiri – Profesional	MISI 4: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN															
4.1	Tujuan 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Indeks Rb	Cc	B		B		B		B		BB		BB		



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Daerah Yang Baik (Good Governance)															
4.1.1.1	Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1. Predikat Sakip	B	B		B		B		B		BB		BB		
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Program Pembangunan Daerah	100%	100%	1.535.094.500	100%	1.432.184.500	100%	1.432.184.500	100%	1.432.184.500	100%	1.510.789.503	100%	7.342.437.503	BAPPEDA DAN LITBANG
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perangkat Daerah	100%	100%	2.724.997.900	100%	1.304.999.205	100%	1.304.999.205	100%	1.304.999.205	100%	1.404.999.205	100%	8.044.994.720	BAPPEDA DAN LITBANG
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian yang diimplementasikan dalam Perencanaan Pembangunan	100%	100%	1.250.000.000	100%	268.983.495	100%	268.983.495	100%	268.983.495	100%	261.773.489	100%	2.318.723.974	BAPPEDA DAN LITBANG
4.1.1.2		2. Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan Terhadap Objek Pemeriksaan	100%	100%	2.678.910.800	100%	2.505.000.000	100%	2.505.000.000	100%	2.505.000.000	100%	2.505.000.000	100%	12.698.910.800	INSPEKTORAT
4.02.02	Program Dukungan	Persentase Unit Kerja Yang	100%	100%	15.021.484.7	100%	15.244.521.8	100%	15.244.521.80	100%	16.019.521.80	100%	16.327.579.40	100%	77.857.629.58	SEKRETARIAT DPRD



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2022			2023		2024		2025		2026						
	Program Pembangunan Daerah			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Mendapat Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur			80		00		0		0		0		0	KABUPATEN MALINAU
4.1.2	Sasaran 2. Terselenggarany a Pemerintahan Yang Transparan	1. Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	-	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah	100%	100%	1.400.000.00 0	100%	1.200.000.00 0	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	6.200.000.000	BPKD
4.1.3	Sasaran 3. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	4%-6%	4%-6%		4%-6%		4%-6%		4%-6%		4%-6%		4%-6%		
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan Pbb P2 Dan Bphtb	100%	100%	2.500.000.00 0	100%	1.750.000.00 0	100%	1.650.000.000	100%	1.750.000.000	100%	1.750.000.000	100%	9.400.000.000	BPKD
4.1.4	Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B		Bb		Bb		Bb		Bb		Bb		
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Pendampingan Yang Diilaksanakan	100%	100%	1.086.566.85 0	100%	875.000.000	100%	875.000.000	100%	875.000.000	100%	875.000.000	100%	4.586.566.850	INSPEKTORAT
4.1.5	Sasaran 5. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan	Persentase Peningkatan Status Desa	11,93%	13,76%		15,59%		17,74%		19,22%		21,05%		21,05%		



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcomes)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2022			2023		2024		2025		2026						
	Target			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Berbasis Desa	Mandiri														
2.13.02	Program Penataan Desa	Presentase Pengentasan Desa Tertinggal	100%	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	2.450.000.000	DPMD
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Presentase Desa Yang Melakukan Kerjasama Antara Desa	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	1.000.000.000	DPMD
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Administrasi Pemerintahan Desa Yang Baik	100%	100%	1.115.000.00 0	100%	1.515.000.00 0	100%	1.275.000.000	100%	1.625.000.000	100%	1.250.000.000	100%	6.780.000.000	DPMD

Sumber data diolah 2021

